

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar daerah pesisir yang ada di Indonesia berupa hamparan hutan mangrove yang luas. Hutan mangrove di Indonesia telah mewakili 23% dari seluruh ekosistem mangrove dunia (Giri dalam Santoso, 2021). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 dijelaskan bahwa luas lahan mangrove di Indonesia telah mencapai 3.364.076 ha.

Mangrove menjadi perhatian pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah yang berisikan dasar kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan strategi yang harus mampu menjamin keberadaan, keberlanjutan fungsi dan manfaat ekosistem mangrove dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan tersebut sebagai langkah dalam pelestarian hutan mangrove melalui pelaksanaan tugas setiap *stakeholders* dalam suatu pengelolaan secara optimal demi menjaga ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

Menurut Safitri, *et al.* (2023) menyebutkan bahwa kerapatan ekosistem mangrove di Kota Semarang mengalami perubahan yang cukup signifikan antara tahun 2013 dan 2022. Penurunan kerapatan ekosistem mangrove terjadi dari angka 412.889 ha menjadi 142.562 ha, sehingga total penurunan kerapatan ekosistem mangrove Kota Semarang seluas 270.327 ha (65,5%). Hal tersebut memerlukan suatu pengelolaan yang didukung berbagai *stakeholders* terkait untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem mangrove dari berbagai ancaman.

Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Tugu menjadi kawasan mangrove terluas yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan yang memiliki mangrove. Hutan mangrove sangat berpotensi terhadap keberlanjutan pemenuhan hidup, namun seringkali terjadi perubahan ataupun perluasan lahan oleh *stakeholders*. Berikut perubahan luas tata guna lahan sebagai di Kawasan Pesisir Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Tabel 1.1

Perubahan Luas Tata Guna Lahan Kecamatan Tugu

No.	Kualifikasi	Luas Lahan	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Mangrove	31,967 ha	48,287 ha
2.	Tambak	328,090 ha	319,852 ha
3.	Industri	42,317 ha	59,75 ha
4.	Pemukiman	65,031 ha	65,124 ha
5.	Luasan Pantai	12,541 ha	9,817 ha
6.	Sawah	83,200 ha	76,348 ha
7.	Bandara	58,652 ha	58,652 ha
8.	Sungai	22,223 ha	5,025 ha

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (2019)

Berdasarkan data tabel tersebut, kawasan hutan mangrove di Kecamatan Tugu mengalami peningkatan yang harus diikuti dengan upaya pelestarian yang baik untuk menjaga keutuhan dari fungsi mangrove. Kawasan ini menunjukkan adanya bentuk campur tangan manusia dalam memenuhi kepentingan tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena kawasan pesisir sebelumnya banyak dikonversi menjadi daerah tambak dan pemukiman akibat melonjaknya harga udang saat krisis moneter, sehingga mendorong masyarakat setempat untuk memberdayakan hutan mangrove dan merelokasi hutan mangrove menjadi habitat udang atau ikan dibandingkan pembukaan lahan baru.

Hutan mangrove yang berada di Kecamatan Tugu, khususnya Kelurahan Tugurejo dengan luas 53,51 ha merupakan kawasan pesisir yang paling utuh. Hal ini ditegaskan oleh Santoso (2018) yang menyebutkan bahwa ekosistem mangrove Tapak adalah salah satu hutan mangrove terbaik di Kota Semarang dengan kekayaan berbagai spesies dan memiliki ekosistem yang cukup luas. Kawasan ini telah ditanami dengan lima jenis mangrove yang berbeda dengan total jumlah pohon mangrove mencapai 3 sampai 5 juta pohon. Angka tersebut memberikan manfaat yang cukup besar bagi pesisir dan sekitarnya.



Gambar 1.1

Hutan Mangrove Tapak di Kelurahan Tugurejo

Sumber : kectugu.semarangkota.go.id (2018)

Upaya pelestarian kembali terhadap hutan mangrove yang sempat rusak sebelumnya, telah menjadi perhatian masyarakat Kelurahan Tugurejo terutama Dukuh Tapak melalui penanaman yang dilakukan secara rutin terhadap mangrove yang rusak. Potensi unik dan benilai tinggi membuat keberlanjutan dari mangrove ini terancam, maka perlu ditangani secara khusus dengan berbagai peran dari

stakeholders terkait agar perencanaan dan pengelolaan dapat dilakukan sebagai penanggulangan permasalahan lingkungan di kawasan Hutan Mangrove Tapak.

Tabel 1.2

Stakeholders yang Terlibat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Tapak

<i>Stakeholders</i>	
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang • Dinas Perikanan Kota Semarang • Kelurahan Tugu
Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • CV Akar Energi Mandiri
Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip
Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Prenjak • Pokdarwis Bina Tapak Lestari • Masyarakat Tapak

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak telah melibatkan berbagai aktor kepentingan yang berperan dalam menjaga ekosistem mangrove dan lingkungan sekitarnya. *Stakeholder* pemerintah mencakup DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perikanan Kota Semarang, dan Kelurahan Tugurejo yang berperan sebagai pihak yang melindungi kebijakan di area sekitar mangrove sesuai dengan fungsi dan tujuan dari setiap instansi. *Stakeholder* swasta juga berperan yakni CV Akar Energi Mandiri yang turut mendukung pelestarian di area mangrove seringkali memberikan bantuan logistik. *Stakeholder* akademisi berupa Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengenalan metode untuk mengembangkan potensi dari kawasan mangrove. Sementara itu, *stakeholder* masyarakat memainkan peran penting seperti Prenjak

dan Pokdarwis Bina Tapak Lestari yang memiliki pengetahuan lokal dan berperan sebagai penggerak utama dalam menjaga ekosistem mangrove dan menyebarkan kesadaran lingkungan kepada Masyarakat Tapak. Namun, *stakeholders* pemerintah yang bertindak sebagai regulator, pengawas serta melakukan perlindungan terhadap ekosistem mangrove ini belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan baik.

Fakta yang didapatkan peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan informan Sumijo selaku pengelola Hutan Mangrove Tapak pada tanggal 17 Oktober 2023 menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan. *Pertama*, masalah yang muncul dari proses pengelolaan mangrove tapak adalah kurangnya koordinasi antara Pemerintah dengan kelompok masyarakat yang diakibatkan komunikasi yang kurang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara dengan Sumijo, sebagai berikut :

“Komunikasi dengan pemerintah belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Sebenarnya, kami ingin pemerintah masuk ke dalam pengelolaan mangrove Tapak, namun sepertinya ada miskom dari pemerintah dimana mungkin mereka pikir telah melaksanakan tugas di Pantai Tirang yang termasuk area Tugurejo, padahal beda area pengelolaan. Mungkin karena disana ada wisata pantai jadi eksistensinya lebih tinggi dan hutan mangrove tidak terlihat oleh pemerintah. Padahal, pihak pemerintah beberapa kali mengunjungi hutan mangrove ini tapi sampai saat ini belum ada perhatian yang signifikan. Jadi, koordinasi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat disini masih terbilang rendah”. (Wawancara dengan Pengelola Hutan Mangrove Tapak, tanggal 17 Oktober 2023, pukul 11.21)

Pernyataan dari pengelola mangrove ini juga didukung oleh penelitian dari Hapsari dan Harsasto (2017) terkait Pola Kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kelompok Prenjak di Tapak yang menyatakan komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Kelompok Prenjak dalam pengelolaan

hutan mangrove mengalami fluktuatif yang dimulai dari kurang adanya komunikasi yang baik sehingga muncul rasa kurang saling percaya.

Kedua, kurangnya komitmen pihak pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan yang dibuktikan belum adanya MoU yang mengatur pengelolaan Hutan Mangrove Tapak secara khusus antara kelompok masyarakat terutama Prenjak dengan pemerintah (Hapsari & Harsasto, 2017). Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Sumijo, sebagai berikut :

“Pemerintah kurang memperhatikan pengelolaan disini, cenderung hanya janji-janji. Masyarakat setempat pernah mendapat pelatihan dari terkait tata kelola dan digitalisasi tapi realisasi belum ada karena wacana saja. Untuk aturan yang diterapkan oleh pemerintah, kita ikut, tetapi dari pemerintahnya susah terkait bantuannya, sudah ada diskusi-diskusi namun setelah itu tetap tidak terealisasi. Kemudian, pengelolaan hutan mangrove disini hanya dari komunitas masyarakat, tidak dari pemerintah. MoU antara pemerintah dengan masyarakat pun belum ada sampai saat ini. Kami berharap 10% saja bantuan dari pemerintah, namun tetap nihil. Selama ini, hanya sekedar bu lurah dan camat melakukan survey dan observasi tetapi belum ada tindakan untuk perhatian akan pelestarian dan apa yang dibutuhkan.” (Wawancara dengan Pengelola Hutan Mangrove Tapak, tanggal 17 Oktober 2023, pukul 11.21)

Pengelolaan Hutan Mangrove Tapak cenderung dilakukan oleh kelompok masyarakat, dalam hal ini terdapat kelompok masyarakat yang berperan penting pada kelestarian Hutan Mangrove Tapak yakni Prenjak yang telah mendorong pemberdayaan masyarakat akan pentingnya keutuhan hutan mangrove. Meskipun begitu, pemerintah seharusnya turut serta dalam pengelolaan, namun pada kenyataannya kontribusi pemerintah masih minim dalam pengelolaan dan pelestarian Hutan Mangrove Tapak, sehingga MoU perlu ditekankan untuk terciptanya pelaksanaan peran masing-masing *stakeholder* yang optimal.

Ketiga, belum optimalnya kerja sama dengan swasta dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak. Pelaksanaan pengelolaan tersebut telah beberapa kali melakukan kerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung pemenuhan fasilitas, seperti perahu dan APO (Alat Pemecah Ombak). Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara dengan Sumijo pada 17 Oktober 2023 yang mengatakan :

“Kami beberapa kali telah bekerja sama dengan swasta tapi hanya pada jangka waktu tertentu, paling lama setahun. Mereka membantu fasilitasi yang mendukung pengelolaan mangrove disini, seperti perahu dan APO. Sebenarnya, kami sebagai masyarakat disini ingin bekerja sama dengan pihak swasta secara berkelanjutan. Namun, swasta sebagai CSR istilahnya hanya memberikan fasilitas lalu pergi, mungkin hanya untuk membalas budi dari limbah yang mereka hasilkan untuk lingkungan.” (Wawancara dengan Pengelola Hutan Mangrove Tapak, tanggal 17 Oktober 2023, pukul 11.21)

Pengelolaan Hutan Mangrove Tapak berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa peran dari swasta dirasa masih kurang maksimal. Hal tersebut akibat dari kerja sama dengan swasta bersifat kontrak dengan jangka waktu yang cukup pendek. Beberapa fasilitas yang diperlukan belum terpenuhi, seperti pembuatan toilet portabel dan penerangan jalan untuk menyokong keberlangsungan kegiatan pengelolaan. Selain itu, kurangnya dana untuk menunjang proses pengelolaan hutan mangrove karena jarang dilakukan kerja sama dengan pihak swasta sebagai investor.

Pernyataan dari pengelola tersebut juga didukung oleh penelitian dari Fiqhi Aliya *et al.* (2023) terkait Penerapan Prinsip Ekowisata pada Mangrove di Desa Tapak yang menyatakan bahwa aktivitas di area mangrove belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mampu membangun kebermanfaatan mangrove sebagai objek pariwisata dan meminimalisir dampak negatif terhadap ekosistem mangrove. Fasilitas yang dibangun perlu menerapkan prinsip ekowisata agar mampu menjaga

keletarian mangrove dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Tentu saja, hal tersebut sangat berpengaruh pada keterlibatan swasta dalam melestarikan mangrove secara berkelanjutan. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang ada diharapkan mampu menjadikan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak lebih yang dilakukan para *stakeholders* dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar tetap saling bersinergi, sehingga tercipta pengelolaan Hutan Mangrove Tapak yang berkelanjutan.

Potret sebuah peran *stakeholders* dapat dilihat dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak, Kelurahan Tugurejo dengan melibatkan beberapa aktor penting yang terdiri dari pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas. Dalam konteks ini, peneliti menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak agar setiap aktor memiliki andil dalam melaksanakan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak. Maka dari itu, dapat tercipta sinergitas dalam membangun pelestarian Hutan Mangrove Tapak yang dilakukan oleh *stakeholders* yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

Tolok ukur keberhasilan pengelolaan dan pelestarian Hutan Mangrove Tapak dalam pembangunan berkelanjutan harus berkaitan dengan keterlibatan banyak pihak bukan secara *independent* demi tercapainya pengelolaan ekosistem hutan mangrove, dapat dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik dan melaksanakan kegiatan berdasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing yang disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah publik tertentu (Dwiyanto, 2012). Dengan demikian, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui

bagaimana peran *stakeholders* melalui analisis masing-masing aktor dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah penelitian tentang bagaimana peran *stakeholders* dalam keberlangsungan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peran setiap *stakeholders* dalam kegiatan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak.

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperkaya pengetahuan tentang peran *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak.
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya pengelolaan hutan mangrove dalam menjaga ekosistem beserta manfaatnya terutama masyarakat sekitar pesisir.
3. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi penulis, kelompok masyarakat, universitas, industri, LSM dan Pemerintah Kota Semarang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai analisis peran *stakeholders* khususnya pengelolaan Hutan Mangrove Tapak. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan penulis mengenai peristiwa atau fenomena yang terjadi saat ini.

2. Bagi Universitas

Memperkaya penelitian ilmiah khususnya mengenai lingkungan dari sudut pandang Administrasi Publik yang dapat digunakan untuk bahan rujukan bagi berbagai penelitian ilmiah selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pengetahuan khususnya mengenai peran *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak, serta memberikan masukan yang dapat membangun pemerintah sebagai pengelola kebijakan agar tidak mengancam ekosistem hutan mangrove

4. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai peran mereka dan memperluas peran serta masyarakat dalam keberlangsungan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak.

1.5 Kajian Teori

Kajian teori adalah suatu kerangka konseptual yang mengandung teori dan model yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka memahami dan menganalisis suatu fenomena dengan tujuan menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Kajian teori memiliki peran penting sebagai dasar bagi peneliti dalam mencari jawaban atas fenomena tersebut dengan pendekatan yang sistematis dan bertanggung jawab.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
1.	<p>Syahputra, Hasnanda, <i>et al.</i> Stakeholder analysis in community based mangrove management: Case of forest management unit in Region 3 of Aceh Province. Jurnal Manajemen dan Hutan Tropika. (2018).</p>	<p>Mengidentifikasi dan memetakan seberapa besar daya, kepentingan dan kemampuan para <i>stakeholder</i> berinteraksi dalam jaringan sosial.</p>	<p>Peneliti menggunakan Teori <i>Social Network Analysis</i> (Borgatti <i>et al.</i>, 2022) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Degree centrality 2. Closeness centrality 3. Betweenness <p>Teori Identifikasi Aktor (Reed <i>et al.</i>, 2009) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjects 2. Key Players 3. Context Setter 4. Crowd 	<p>Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik <i>snowball sampling</i>.</p>	<p>Hasil studi ditemukan bahwa KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) sebagai organisasi pengelola pada level tapak belum terlihat perannya dalam upaya meningkatkan kepentingan dan pengaruhnya. Kemudian, dilakukan penentuan posisi <i>stakeholder</i> terkait seperti komunitas Desa Pusong Kapal, komunitas Pusong Telaga Tujoh, komunitas hutan, kepala desa, dan komunitas pemimpin yang memiliki kemampuan pengelolaan dengan cara mendukung mekanisme dan menumbuhkan aspirasi ketika merumuskan dan merancang strategi yang lebih kuat. Dari</p>

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
					<p>analisis jaringan dapat diidentifikasi <i>stakeholder</i> yang memiliki pengaruh besar, pemimpin opini, akses cepat, ataupun perantara dalam jaringan. Dengan itu didapatkan informasi yang berguna dalam membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan melibatkan pola interaksi. Seiring waktu, semakin lama hubungan dibangun akan semakin besar kemungkinan interaksi dapat dikembangkan secara optimal akan adanya hubungan timbal balik dan komitmen bersama.</p>
2.	<p>Melo, R. H., <i>et al.</i> A stakeholder analysis of sustainable mangrove management in Kwandang, Sub-district of North, Gorontalo District.</p>	<p>Mengidentifikasi dan memetakan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan mangrove lestari</p>	<p>Peneliti menggunakan Teori Identifikasi Aktor (Bryson, 2004) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjects 2. Key Players 3. Context Setter 	<p>Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik <i>snowball sampling</i>.</p>	<p>Hasil studi menyajikan pengelompokan <i>stakeholders</i>, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Subjects</i> : Masyarakat, Pemerintah Desa 2. <i>Key Players</i> : KPH IV Gorut, DLH Gorut, Bappeda

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
	Earth and Environmental Science Journal. (2019).	serta mendeskripsikan peran dan tugas pokok setiap <i>stakeholders</i> .	4. Crowd Teori Peran Stakeholder (Nugroho, 2014) : 1. Policy Creator 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementor 5. Akselerator		Gorut, DLK Gorut, DPRD II Gorut, LSM dan BPDASHL 3. <i>Context Setter</i> : Satpol Air, Koramil, Perguruan Tinggi dan Swasta/Pemilik Modal 4. <i>Crowd</i> : -
3.	Alfandi, Desrian <i>et al.</i> Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Provinsi Lampung. Jurnal Syiva Lestari. (2019).	Mengetahui seberapa tinggi tingkat dan tipe partisipasi Kelompok Paguyuban Peduli Lingkungan (PAPELING) dalam proses pengelolaan mangrove.	Peneliti menggunakan Teori Tingkat Partisipasi Masyarakat (Arnstein, 1969) : 1. Manipulasi 2. Terapi 3. Informasi 4. Konsultasi 5. Peredaman 6. Kemitraan 7. Pendelegasian kekuasaan	Pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif melalui <i>snowball sampling</i> .	Hasil studi menyajikan bahwa partisipasi pada kelompok PAPELING termasuk ke dalam jenis partisipasi terapi dan pasif yang dicirikan oleh terbangunnya komunikasi walaupun terbilang masih terbatas dan perencanaan dalam kegiatan masih rendah. Hal tersebut diakibatkan oleh peran pemerintah yang bersifat <i>top down</i> sehingga membatasi ruang gerak dalam menyampaikan

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
			8. Pengawasan masyarakat Teori Partisipasi (Hobley, 1969) : 1. Manipulasi 2. Pasif 3. Melalui konsultasi 4. Untuk intensif 5. Fungsional 6. Interaktif 7. Inisiatif		aspirasi terkait pengelolaan mangrove.
4.	Septiarani, Bintang dan Handayani, Wiwandari. Community Group Networking on the Community-based Adaptation Measure in Tapak Village, Semarang Coastal Area. Indonesian Journal of Geography. (2020).	Mengelaborasi pentingnya aspek jejaring dalam Adaptasi Berbasis Masyarakat (CBA) yang berjalan di Kawasan Pesisir Semarang.	Peneliti menggunakan Teori Social Network Analysis (John Scott, 2000) : 1. Plot jaringan 2. Pola struktural 3. Ukuran jaringan	Pendekatan penelitian ini menggunakan metode campuran.	Hasil studi menunjukkan bahwa adanya jaringan salah satu <i>stakeholder</i> yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan mangrove yakni komunitas Prenjak. Prenjak sebagai <i>focal point</i> jaringan pemangku kepentingan dalam proses jejaring CBA di Tapak. Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang (KKMKS) sebagai wadah bagi Prenjak untuk mengakses lebih banyak

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
					<p>jaringan juga terbukti membawa dampak positif bagi keberlangsungan proses CBA di Tapak. Dalam hal ini, partisipasi kelompok masyarakat seperti partisipasi Prenjak dan jejaringnya di antara pemangku kepentingan CBA dapat dianggap sebagai pelajaran bagi CBA terutama dalam hal menjaga keberlanjutannya.</p>
5.	<p>Destiana, Riska., <i>et al.</i> Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. (2020).</p>	<p>Mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan yang terlibat serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan pariwisata halal Pulau Penyengat.</p>	<p>Peneliti menggunakan Teori Peran Stakeholder (Nugroho, 2014) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Policy creator</i> 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementor 5. Akselerator 	<p>Pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif.</p>	<p>Hasil studi menyajikan pengelompokan <i>stakeholders</i> dalam pengembangan destinasi pariwisata halal, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Policy creator</i> terdiri dari DPRD Kota Tanjungpinang, Walikota Tanjungpinang, Barenlitbang Kota Tanjungpinang, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang 2. Koordinator yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
					Pariwisata Kota Tanjungpinang 3. Fasilitator yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Satuan Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, Dinas Perhubungan, MUI Kepulauan Riau, LPPOM Kepulauan Riau, serta Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 4. Implementor terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Pokdarwis Pulau Penyengat, Himpunan Pariwisata Indonesia Tanjungpinang, agen

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
					<p>perjalanan, serta penduduk setempat Pulau Penyengat</p> <p>5. Akselerator terdiri dari akademisi berupa KKN Mahasiswa UGM, media massa, komunitas <i> blogger </i> di Tanjungpinang</p> <p>Kemudian, faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan destinasi Pariwisata Halal Tanjungpinang, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Pendukung berupa nilai profesionalitas dan kepentingan umum, serta komunikasi yang efektif 2. Faktor Penghambat berupa tingginya rasa kurang percaya antar stakeholder dan belum didukung kebijakan yang memadai
6.	Na'im, Muhamad <i> et al. </i>	Mengetahui bagaimana posisi <i> stakeholder </i> dan	Peneliti menggunakan Teori	Pendekatan penelitian ini	Hasil studi menyajikan pengelompokan <i> stakeholders </i> , sebagai berikut :

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
	<p>Penguatan Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Cemara Kabupaten Indramayu.</p> <p>Jurnal Planning for Urban Region and Environment. (2020).</p>	<p>memberikan rekomendasi dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove di Desa Cemara.</p>	<p>Identifikasi Aktor (Reed <i>et al.</i> 2009) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjects 2. Key Players 3. Context Setter 4. Crowd 	<p>adalah metode kualitatif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Subjects</i> terdiri dari DLH, Kelompok Tambak Bandeng Intan dan KOMPEPAR Kedung Cowet 2. <i>Key Players</i> terdiri dari Diskanla, Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan dan Pemda 3. <i>Crowd</i> terdiri dari Bappeda dan Pemerintah Kecamatan Losarang <p>Penguatan peran <i>stakeholder</i> perlu dilakukan melalui pengawasan oleh pihak Perhutani sebagai pelaksana utama program pengelolaan hutan mangrove, melakukan kerja sama dengan pelaksana lainnya, dan melakukan penegakkan hukum. Diskanla Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Desa Cemara perlu melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan</p>

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
					mangrove. CBK perlu memberi sumber daya dalam proses rehabilitasi mangrove. Bappeda dan DLH perlu bekerja sama dengan terlibat langsung melalui kerja sama dengan <i>stakeholder</i> lainnya. Kemudian, kelompok masyarakat sepatutnya tidak hanya sebagai pemanfaat mangrove tetapi ikut melestarikan hutan mangrove Desa Cemara.
7.	Fikri, Rachman., <i>et al.</i> Optimizing Stakeholder Role in Handling Conflict Between College of Pencak Silat Setia Hati Terate With Setia Hati Winongo. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). (2021).	Melakukan pemetaan <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam penanganan konflik antara dua perguruan pencak silat PSHT dan PSHW di Kabupaten dan Kota Madiun.	Peneliti menggunakan Teori Peran Stakeholder (Nugroho, 2014) : 1. Policy Creator 2. Coordinator 3. Fasilitator 4. Implementor 5. Akselerator	Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil studi menyajikan pemetaan pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi peran <i>stakeholders</i> untuk penanganann konflik sosial kedua kubu perguruan silat, antara lain : 1. <i>Policy Creator</i> bertugas merumuskan kebijakan yang terdiri dari Bupati dan Walikota Madiun, DPRD Kabupaten dan Kota Madiun

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
					<p>2. Koordinator bertugas menjadi kunci koordinasi antara Bupati dan seluruh perangkat organisasi daerah yang terdiri dari Bappeda Kabupaten dan Kota Madiun</p> <p>3. Fasilitator bertugas menyediakan sarana pembinaan dan pengembangan budaya pencak silat yang terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dan Kota Madiun, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM, IPSI Kabupaten dan Kota Madiun</p> <p>4. Implementor bertugas menjaga keamanan dan ketentraman sebagai bentuk</p>

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
					<p>penanganan konflik yang terdiri dari Polres Kabupaten dan Kota Madiun, Kodam 0803/Madiun, rombongan pencak silat Kabupaten dan Kota Madiun</p> <p>5. Akselerator bertugas mempercepat terjadinya pengaruh baik dalam transformasi konflik yang terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dan Kota Madiun serta Humanis.</p>
8.	<p>Chamberland-Fontaine, Sarah., <i>et al.</i></p> <p>Enhancing the Sustainable Management of Mangrove Forests: The Case of Punta Galeta, Panama.</p> <p>Trees, Forests and People Journal. (2022).</p>	<p>Memahami tantangan dan peluang yang terkait dengan SMM (<i>Sustainable Mangrove Management</i>) tingkat lokal di Punta Galeta dan</p>	<p>Peneliti menggunakan Teori 5 Principles of Sustainable Mangrove Management (Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, 2017) :</p>	<p>Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik <i>snowball sampling</i>.</p>	<p>Hasil studi menemukan bahwa pengaruh pelaku masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tetap tidak merata, yang berisiko melanggengkan masalah tingkat masyarakat seperti kontaminasi, kurangnya akses ke hutan bakau, dan lemahnya kepatuhan terhadap langkah-langkah konservasi.</p>

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
		<p>untuk mengidentifikasi wawasan tentang relevansinya antara Panama dan Amerika Latin juga mengidentifikasi beberapa strategi SMM yang berhasil seperti peningkatan kesadaran mengenai manfaat sosial-ekologis hutan bakau.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laws, policies and law enforcement 2. Sound land-use planning 3. Promoting effective mangrove restoration, monitoring and science based decision making 4. Facilitating access to financing mechanisms 5. Generating and disseminating knowledge on mangrove ecosystems 		<p>Kemudian, <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan mangrove diidentifikasi bertanggung jawab atas deforestasi mangrove lokal, yang awalnya menimbulkan persaingan dengan kawasan lindung Punta Galeta yang berorientasi konservasi. Namun, seiring waktu berubah menjadi lebih kooperatif karena elemen relasional, termasuk kepemimpinan dan pembangunan kepercayaan melalui pengaturan yang saling menguntungkan, seperti sponsor perusahaan inisiatif pendidikan lingkungan sebagai kompensasi atas kerusakan lingkungan di masa lalu. Situasi seperti ini menggambarkan mekanisme 'kemenangan kecil' yang dapat mendukung siklus kolaborasi yang baik dimana memperdalam</p>

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
					kepercayaan dan pemahaman bersama.
9.	<p>Kalsum, Ummu <i>et al.</i></p> <p>Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan Mangrove Luwuk Timur Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.</p> <p>Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil. (2022).</p>	<p>Mengidentifikasi <i>stakeholders</i> dan menguraikan hubungan antar <i>stakeholders</i> dalam kegiatan pengelolaan Hutan Mangrove Luwuk Timur.</p>	<p>Peneliti menggunakan Teori Identifikasi Aktor (Bryson, 2004) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjects 2. Key Players 3. Context Setter 4. Crowd 	<p>Pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif melalui teknik <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>Hasil studi mengelompokkan <i>stakeholder</i>, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Subjects</i> terdiri dari DLH Provinsi Sulawesi Tengah 2. <i>Key Player</i> terdiri dari BPDASHL Palu-Poso, KPH Balantak 3. <i>Context Setter</i> terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng 4. <i>Crowd</i> terdiri dari Dinas Kehutanan Sulteng, Bappeda Sulteng, DLH Kab. Banggai dan Biro SDA, Universitas Utadulako, PT Lautan Gunung Mas, Camat, Desa Hunduhon, Desa Kayutanyo, Desa Uwedikan, Desa Bantayan, dan masyarakat. <p>Kemudian, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL)</p>

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
					<p>Palu Poso dengan KPH Balantak perlu berkoordinasi terhadap <i>stakeholder</i> lainnya seperti Camat, Desa Hunduhon, Desa Kayutanyo, Desa Uwedikan, Desa Bantayan, dan masyarakat. Pelaksanaan koordinasi juga dilakukan terhadap PT Lautan Gunung Mas dalam memperhatikan limbah pembuangan untuk menjaga ekosistem. Terlihat bahwa peran <i>stakeholders</i> belum optimal karena belum adanya pembagian peran dan tanggungjawab dalam mengoptimalkan pengelolaan hutan mangrove.</p>

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
10.	<p>Maharani, Gusti Ayu., <i>et al.</i></p> <p>The Role of Stakeholders in The Development of Tourism Attraction at Mertasari Beach, Sanur.</p> <p>Journal of Applied Science in Tourism Destination. (2023).</p>	<p>Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang berperan dalam pengembangan DTW (Daya Tarik Wisata) Pantai Mertasari.</p>	<p>Peneliti menggunakan Teori Kategori Stakeholder (Handayani dan Warsono, 2017) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stakeholders</i> utama (primer) 2. <i>Stakeholders</i> kunci 3. <i>Stakeholders</i> pendukung (sekunder) <p>Teori Peran Stakeholder (Nugroho, 2014) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Policy Creator 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementor 5. Akselerator 	<p>Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Hasil studi ini menyajikan pengelompokan <i>stakeholder</i> dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Mertasari, dengan kategori kelompok antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stakeholders</i> utama terdiri dari Bendesa Adat Intaran, BUPDA Intaran, Pokdarwis Desa Sanur Kauh, dan Taman Inspiring Muntig Siokan 2. <i>Stakeholders</i> kunci terdiri dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar 3. <i>Stakeholders</i> sekunder terdiri dari Perbekel Desa Sanur Kauh, Politeknik Negeri Bali dan Tribun Bali <p>Kemudian, disajikan pemetaan peran <i>stakeholders</i>, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Policy creator</i> terdiri dari Bendesa Adat Intaran dan Dinas Pariwisata Denpasar

No	Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
					<ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinator terdiri dari Bendesa Adat Intaran dan BUPDA Intaran 3. Fasilitator terdiri dari Taman Inspirasi Muntig Siokan, Perbekel Desa Sanur Kauh, Dinas Pariwisata Denpasar dan Tribun Bali 4. Implementor terdiri dari Taman Inspirasi Muntig Siokan dan BUPDA Intaran 5. Akselerator terdiri dari Perbekel Desa Sanur Kauh, Politeknik Negeri Bali dan Pokdarwis Desa Sanur Kauh.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2023)

Penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian tersebut mengidentifikasi dan memetakan berdasarkan daya, kepentingan dan kemampuan para *stakeholder* dalam berinteraksi pada jaringan sosial dengan menggunakan Teori *Social Network Analysis* (Borgatti *et al.*, 2022) dan Teori Identifikasi Aktor (Reed *et al.*, 2009), sedangkan penelitian ini mengidentifikasi peran setiap *stakeholders* menggunakan Teori *Quadruple Helix*.

Penelitian kedua dengan penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian tersebut memiliki lokus di Hutan Mangrove Lestari, Kabupaten Gorontalo, sedangkan penelitian ini memiliki lokus di Hutan Mangrove Tapak, Kota Semarang.

Penelitian ketiga dengan penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian tersebut berfokus pada mengetahui seberapa tinggi tingkat dan mengelompokkan tipe partisipasi Komunitas Paguyuban Peduli Lingkungan (PAPELING) dalam pengelolaan mangrove berdasarkan Teori Tingkat Partisipasi (Arnstein, 1969) dan Teori Partisipasi (Hobley, 1969), sedangkan penelitian ini memiliki fokus untuk mengidentifikasi seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak.

Penelitian keempat dengan penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian tersebut menggunakan Teori *Social Network Analysis* (John Scott, 2000) yang berfokus pada mengidentifikasi aktor terutama komunitas masyarakat dalam pengelolaan mangrove, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Teori Peran *Stakeholders* (Nugroho, 2014) yang berfokus pada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan mangrove.

Penelitian kelima memiliki perbedaan dengan penelitian ini dimana penelitian tersebut mengidentifikasi peran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata halal di Pulau Penyengat, sedangkan penelitian ini mengidentifikasi peran setiap *stakeholders* dengan mengidentifikasi *stakeholders* melalui *quadruple helix* dalam pengelolaan hutan mangrove.

Penelitian keenam dengan penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian tersebut memiliki fokus mengidentifikasi posisi setiap *stakeholders* dan memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan Hutan Mangrove Desa Cemara, sedangkan penelitian ini memiliki fokus mengidentifikasi peran dan tugas pokok setiap *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak.

Penelitian ketujuh memiliki perbedaan dengan penelitian ini dimana penelitian tersebut melakukan pemetaan *stakeholder* dalam menangani konflik antara dua kubu perguruan pencak silat di Kabupaten dan Kota Madiun, sedangkan penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis *stakeholders* dalam mempertegas peran aktor pada pengelolaan Hutan Mangrove Tapak.

Penelitian kedelapan dengan penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian tersebut menganalisis fenomena pengelolaan mangrove berdasarkan prinsip-prinsip *Sustainable Mangrove Management* (Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, 2017) untuk mengetahui tantangan dan peluang yang ada dalam pengelolaan mangrove di Punta Galenta, sedangkan penelitian ini mengidentifikasi peran setiap *stakeholders* berdasarkan Teori Peran *Stakeholders* (Nugroho, 2014).

Penelitian kesembilan dengan penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian tersebut berfokus pada identifikasi *stakeholders* dan menguraikan hubungan antar *stakeholders* dalam pengelolaan mangrove, sedangkan penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis peran setiap *stakeholders* terkait yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak

Penelitian kesepuluh memiliki perbedaan dengan penelitian ini dimana penelitian tersebut mengelompokkan *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata di Pantai Mertasari, sedangkan penelitian ini mengidentifikasi peran *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak.

1.5.2 Administrasi Publik

Istilah administrasi menurut masyarakat umum di Indonesia merupakan praktik ketatausahaan yang mana pemahaman tersebut telah berakar dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat biasa yang belum mempelajari ilmu administrasi secara mendalam (Silalahi, 2009). Kecenderungan masyarakat Indonesia yang mendefinisikan administrasi telah keliru. Secara kajian secara ilmiah, ilmu administrasi mencakup proses, fungsi, dan institusi dari setiap kegiatan kerja sama.

Secara sempit, istilah ilmu administrasi dikemukakan oleh beberapa ahli administrasi sebagai pengelolaan informasi dan data yang keluar dan masuk ke organisasi yang memiliki rangkaian aktivitas dari menerima, mencatat, mengklasifikasi, mengolah, menyimpan, mengetik, dan mengirim data dan informasi secara tertulis yang diperlukan oleh organisasi (Silalahi, 2003). Selain itu, ahli lain mengemukakan bahwa ilmu administrasi sebagai keseluruhan kegiatan

yang bersifat ketatausahaan yang mencakup surat-menyurat termasuk pencatatan dan pengelolaan data yang diperlukan oleh pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan dan mengambil keputusan terkait dengan tugas dan fungsi organisasi (Banga, 2018).

Kemudian, istilah ilmu administrasi secara luas didefinisikan oleh ahli sebagai mengatakan bahwa administrasi secara umum merupakan keseluruhan proses dari berbagai aktivitas pencapaian tujuan yang dilakukan secara efisien melalui orang lain (Robbins, 1983 : 9). Administrasi dapat didefinisikan sebagai proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan (Plano dan Chandler, 1988). Sedangkan publik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu orang banyak (umum).

Menurut Chandler dan Plano dalam Hardiyansyah (2016), mengungkapkan bahwa administrasi publik merupakan serangkaian proses yang sumberdaya dan personel publiknya diorganisir serta dikoordinasikan untuk dapat memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Feshler (1980) mengungkapkan bahwa administrasi publik merupakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar guna memenuhi kebutuhan publik. Barton & Chappel menganggap administrasi publik sebagai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari definisi tersebut bisa dilihat terdapat penekanan pada aspek keterlibatan personil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan pengertian administrasi publik secara umum yakni suatu keseluruhan penyelenggaraan

kekuasaan pemerintah negara yang melibatkan berbagai aktor dari publik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terciptanya tujuan dan terlaksananya tugas negara demi memenuhi kepentingan masyarakat.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Kuhn dalam T. Keban (2004 : 31) berpendapat bahwa paradigma digunakan sebagai sudut pandang, nilai, metode, prinsip dasar, dan tata cara dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh masyarakat pada waktu tertentu. Nicholas Henry mengungkapkan terdapat lima paradigme dalam administrasi public berdasarkan fokus kepentingan dan lokus secara institusional dipraktikkan.

Paradigma pertama yakni Dikotomi Politik dan Administrasi memiliki dua fungsi yang berbeda dalam konteks pemerintahan berupa politik dan administrasi. Politik berhubungan dengan kebijakan dan tujuan negara, sementara administrasi berhubungan dengan pelaksanaan suatu kebijakan negara. Namun, batasan konteks antara politik dan administrasi ini menjadi permasalahan bagi akademisi dan praktisi dalam bentuk dikotomi politik/administrasi. Goodnow mengungkapkan bahwa paradigme pertama ini memiliki keterbatasan karena hanya fokus pada aspek lokus saja, yakni birokrasi pemerintahan, tanpa diimbangi dengan metode pengembangan yang jelas.

Paradigma kedua yakni Prinsip-Prinsip Administrasi Negara menjadi titik puncak dari perkembangan administrasi publik dimana mencapai kejayaannya yang mendapat pengakuan bukan hanya dari pemerintahan, namun juga dari industri. Pada paradigme ini, fokus administrasi publik dalam bentuk prinsip-prinsip

administrasi publik lebih penting dibandingkan lokus. Hal itu karena lokus tidak lagi menjadi persoalan dimana prinsip administrasi berlaku secara luas baik organisasi publik maupun privat. Prinsip administrasi publik diungkapkan oleh Gulick & Urwick dalam buku *Papers on the Science of Administration* (1937) yang berisikan tujuh prinsip yang dikenal POSDCORB yang terdiri dari *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*. Selain itu, Max Weber yang meliputi standarisasi dan formalisasi, pembagian kerja dan spesialisasi, hirarki otoritas, kompetensi dan profesionalisme, serta dokumentasi tertulis.

Paradigma ketiga yakni Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik muncul sebagai akibat dari kritik konseptual bahwa administrasi publik berasal disiplin ilmu politik. Dampak dari paradigma ini adalah perubahan definisi terkait lokus yaitu birokrasi pemerintahan, namun melepaskan hal yang terkait dengan fokus. Paradigma ini melahirkan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik dalam birokrasi pemerintahan. Di sisi lain, paradigma ini memunculkan upaya untuk mengatur ulang hubungan kontekstual antara administrasi negara dan ilmu politik.

Paradigma keempat yakni Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi melibatkan prinsip-prinsip administrasi sebelumnya. Fokus utama dari paradigma ini adalah pengembangan teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori organisasi ini melibatkan kontribusi dari berbagai ahli dalam bidang psikologi sosial, administrasi bisnis, sosiologi dan administrasi publik yang bertujuan untuk memahami perilaku organisasi secara lebih baik. Selain itu, paradigma ini menekankan betapa lemahnya

efektivitas suatu program dalam meningkatkan efisiensi manajemen dengan melibatkan disiplin ilmu ekonomi, sosial, lingkungan, dan lainnya.

Paradigma kelima yakni Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara telah berhasil mendefinisikan fokus dan lokus administrasi publik dengan jelas. Pada tahun 1970 telah terjadi perpecahan antara administrasi publik, manajemen dan ilmu politik dimana berawal dari dibentuknya The National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA) yang kemudian berhasil menjadikan administrasi publik diakui sebagai bidang ilmu tersendiri. Hal ini tercermin dalam perkembangan teori organisasi dan ilmu manajemen serta dalam perluasan lokus untuk menentukan relevansi kepentingan umum dan pembuatan kebijakan umum oleh administrator publik.

Paradigma keenam yakni *Governance* merupakan pergeseran konsep “*government*” yang diperluas menjadi konsep “*governance*” sebagai akibat dari lembaga pemerintah yang seringkali ditemukan memonopoli penyelenggaraan pemerintahan sehingga dianggap kurang memadai untuk menghadapi kompleksitas dalam kegiatan penyelenggaraan urusan publik. Konsep tata kelola mengacu pada organisasi di luar pemerintah, seperti sektor swasta dan masyarakat dalam upaya untuk menyelenggarakan layanan publik agar memberikan peran dan ruang yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga non-pemerintah. Dalam hal ini, kegiatan pemerintahan menjadi lebih inklusif, responsif dan bertanggung jawab kepada kepentingan publik (Dwiyanto, 2003).

Intitusi yang membangun *governance* terdiri dari tiga domain utama yaitu *state* (negara), *private sector* (sektor swasta), dan *civil society* (masyarakat). Ketiga

domain ini saling berinteraksi dan menjalankan peran masing-masing. Institusi pemerintahan bertanggung jawab menciptakan lingkungan hukum dan politik yang kondusif. Sektor swasta berkontribusi dalam menciptakan kerja dan pendapatan. Sementara itu, masyarakat sipil memiliki peran yang positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial dan ekonomi (Rahman, 2012; 71- 72).

Paradigma *governance* mulai diadopsi dalam berbagai proses administrasi dan pemerintahan di negara-negara yang berbeda. Efektivitas sebuah negara dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut sebagai *good governance*. Paradigma ini menghadirkan pandangan baru dalam mengatur negara, terutama dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Dalam konsep *governance* ini, pemerintah bukanlah aktor utama, melainkan terdapat partisipasi berbagai pihak yang terdiri dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Ketiganya memiliki tingkat dan posisi yang sama pentingnya. Perkembangan paradigma ini bertujuan menuju kepada *good governance*.

Pada penelitian ini tergolong ke dalam paradigma keenam yakni *governance*. Paradigma keenam membahas tiga pilar yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang menekankan pada kolaborasi dalam keseimbangan dan kesetaraan, kemudian dikembangkan menjadi pandangan baru yang disebut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Paradigma ini mencakup pengembangan kolaborasi antar *stakeholders* secara sinergis dan konstruktif. Sehingga, paradigma tersebut berkaitan dalam pengelolaan hutan mangrove guna melestarikan dan melindungi ekosistem kawasan pesisir.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen publik adalah salah satu bidang dalam administrasi yang bertugas untuk mengembangkan pemahaman tentang sistem administrasi dan manajemen yang ada di dalam sektor publik ataupun nirlaba. Menurut Laurence Lynn (1996) mengungkapkan tiga kemungkinan mengenai gambaran manajemen publik, yakni sebagai seni, ilmu dan profesi. Secara umum, Lynn berpendapat bahwa manajemen publik sebagai seni adalah aktivitas kreatif yang dilaksanakan oleh para praktisi tidak dapat dipelajari dengan cara 'dihitung' yang berarti manajemen publik suatu aktivitas yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat tergantung dari situasi dan kondisi dimana beroperasi.

Manajemen publik sebagai ilmu berarti hal ini memerlukan suatu analisis sistematis melalui interpretasi dan eksplanasi. Sedangkan, sebagai profesi merujuk kepada sekelompok orang yang mendedikasikan dirinya kepada ilmu ini. Administrasi menurut Sheldon adalah "*The determination of a top-level policy, the co-ordination of the major aspects of the business, and the control of management proper*" yang berarti administrasi berada dalam wilayah *top level*, atau pengambil kebijakan, koordinasi dan kontrol terhadap manajemen.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa administrasi lebih luas daripada manajemen. Namun, Henry Fayol menyatakan sebaliknya yang menyatakan bahwa administrasi merupakan subordinasi dari manajemen, karena administrasi hanyalah salah satu fungsi dari manajemen. Sementara itu, ilmuwan lainnya seperti Van Riper Martin menyatakan bahwa administrasi dan manajemen

merupakan keilmuan yang setara. Geert Bouckert (2004) dan Lynn (2005) juga menyebutkan bahwa administrasi dan manajemen tidak dapat dibedakan.

Para sarjana administrasi publik sebagian besar menyepakati bahwa manajemen publik merupakan salah satu jenis keilmuan dan pembahasan dari administrasi publik. Menurut Federickson & Smith (2003 : 95) meskipun perubahan telah terjadi pada hampir semua sektor dalam administrasi publik, tidak ada pendekatan dalam administrasi publik yang paling kuat selain manajemen. Munculnya manajemen ilmiah yang digagas oleh Frederick W. Taylor, menjadi akar penting dalam keilmuan manajemen publik.

Frederick W. Taylor sebagai pencetus adanya teori manajemen tradisional pada karyanya yang sangat berpengaruh *The Principle of Scientific Management* yang pada tahun 1911 pertama kali dipublikasikan. Subjek yang diamati yakni sektor bisnis, khususnya took dengan tujuan untuk mengubah aturan, kebiasaan, tradisi yang tidak terpolat menjadi manajemen yang berdasar pada prinsip ilmiah, sehingga dapat terpolat dengan baik. Prinsip dari Taylor didasarkan pada pengukuran yang tepat dari proses kerja, seperti misalnya proses seleksi pekerja; dampak; pembagian kerja sehingga hal tersebut meningkatkan produktivitas dan kerja sama antar pekerja guna mencapai tujuan organisasi.

Taylor meyakini bahwa pelaksanaan dari prinsip tersebut akan mengarahkan manajer dan pekerja dalam mencapai jalan terbaik, sehingga dapat memudahkan pencapaian tujuan organisasi. (Federickson & Smith, 2003). Konsep ini kemudian juga diadaptasikan untuk diterapkan pada sektor publik. Henry Fayol

menyebutkan terdapat lima fungsi manajemen yakni *Planning*, *Organizing*, *Directing*, *Controlling* dan *Coordinating*.

Kemudian, ahli lainnya mengembangkan fungsi manajemen seperti menurut Luther Gullick (2003), salah satu dari pencetus administrasi publik modern, mengajukan beberapa prinsip manajemen ilmiah, yang dapat diimplementasikan dalam pemerintahan. Konsep ini kemudian disebutnya sebagai POSDCORB, dimana teori memiliki tujuh fungsi utama manajemen yang terdiri dari *Planning* (Merencanakan), *Organizing* (Mengorganisasikan), *Staffing* (Mengatur Posisi Staf), *Directing* (Mengarahkan), *Coordinating* (Mengkoordinasikan), *Reporting* (Melaporkan) dan *Budgeting* (Anggaran).

Manajemen publik dan ilmu administrasi publik dapat disimpulkan bahwa keduanya akan saling berkaitan satu sama lain dalam membangun mekanisme pemerintahan yang efektif dan efisien, yang dapat pula diterapkan pada sektor nirlaba. Manajemen publik akan tetap berada dengan administrasi publik di masa mendatang.

1.5.6 Peran *Stakeholders*

Bryson dalam Setiawan (2018) mendefinisikan *stakeholders* sebagai individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keberhasilan tujuan organisasi. Sedangkan, aktor kebijakan merupakan individu atau kelompok yang mampu memberikan pengaruh atau diberikan pengaruh dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan tentang prakarsa pembangunan harus mempertimbangkan sumber daya dan persyaratan unik dari

masing-masing kelompok ini. Kelompok tertentu mungkin tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan.

Quadruple helix menurut Carayannis & Campbell (2009) dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari 4 (empat) aktor, antara lain :

1. Pemerintah (*Government*)

Pemerintah sebagai regulator memiliki kemampuan dalam kontrol untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Lebih lanjut, pemerintah didukung oleh kesediaan terhadap pendanaan, SDM, dan infrastruktur yang memadai untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen publik.

2. Akademisi (*Academic*)

Akademisi sebagai konseptor memiliki kemampuan untuk menginsiasi melalui sumber pengetahuan yang dimiliki berupa teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan oleh akademisi menjadi sangat penting dilakukan untuk memahami fenomena secara komprehensif agar kedepannya memudahkan proses pemecahan masalah.

3. Swasta (*Private*)

Bisnis sebagai *enabler* atau biasanya menjadi promotor dalam pelaksanaan suatu kegiatan melalui suntikan dana tambahan sebagai penunjang kebutuhan kegiatan pengelolaan suatu kawasan. Penunjang kebutuhan yang diberikan dapat berbentuk logistik atau akomodasi sebagai bantuan terhadap kegiatan pengelolaan.

4. Masyarakat (*Society*)

Masyarakat memiliki kemampuan dalam menjembatani antar *stakeholders* dalam rangka melaksanakan proses pengelolaan suatu kawasan publik. Umumnya, komunitas berupa kelompok sukarelawan yang ikut terlibat dan berkoordinasi dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan pengelolaan didasari rasa kepedulian dan tujuan yang sama.

Menurut Nugroho *et al.* (2014) mengklasifikasikan *stakeholders* berdasarkan peran dan tugas pokok dalam pelaksanaan suatu program, sebagai berikut :

a. *Policy creator*

Stakeholders yang memiliki peran dalam mengambil keputusan dan menentukan suatu kebijakan.

b. Koordinator

Stakeholders yang memiliki peran dalam mengkoordinasikan kegiatan antar stakeholder yang ikut berpartisipasi.

c. Fasilitator

Stakeholders yang memiliki peran untuk menunjang dan mencukupi kebutuhan dalam suatu kegiatan yang dituju.

d. Implementor

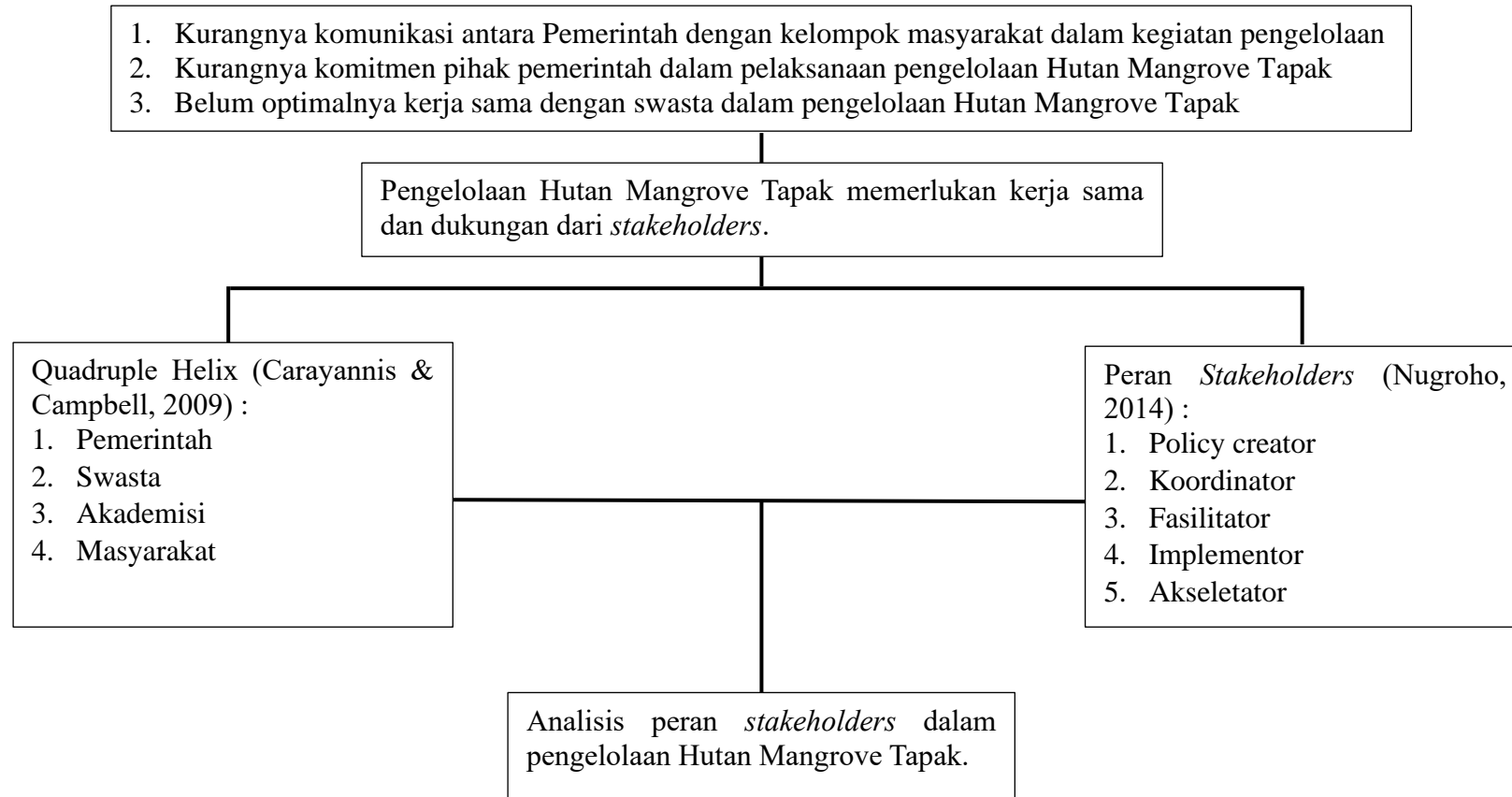
Stakeholders yang memiliki peran untuk melaksanakan kebijakan yang di dalam kebijakan tersebut terdapat objek yang dituju.

e. Akselerator

Stakeholders yang berperan seperti kontribusi dan menetapkan waktu dengan tujuan agar program yang dijalankan tepat dan sesuai sasaran serta waktu pencapaiannya lebih cepat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran *stakeholder* adalah keterlibatan secara aktif individu atau kelompok dalam suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu yang diatur sesuai kemampuan masing-masing *stakeholder*. Pada penelitian ini dilakukan pengelompokan *stakeholders* yakni *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.7 Operasionalisasi Konsep

Pengelolaan hutan mangrove yakni proses manajemen yang dilakukan untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove dalam menyeimbangkan ekosistem di daerah pesisir. Pengelolaan ini perlu dilakukan oleh *stakeholders* untuk menciptakan mangrove yang berkelanjutan, sehingga perlu perhatian pada pelaksanaan tugas dan fungsi *stakeholders* dengan mengetahui peran masing-masing sesuai kedudukan dan jabatan dalam sebuah kebijakan. Adapun operasionalisasi dari analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak dapat dilihat dengan gejala, sebagai berikut :

1) *Policy creator*

Policy creator atau disebut dengan perumus kebijakan adalah *stakeholders* yang berwenang untuk membuat regulasi atau kebijakan mengenai pengelolaan Hutan Mangrove Tapak di Kota Semarang. Kriteria gejala yang diamati dari variabel ini terhadap *stakeholders*, sebagai berikut :

- Memiliki wewenang dalam membuat kebijakan
- Membentuk kebijakan atau regulasi

2) Koordinator

Stakeholder ini memiliki peran untuk mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terkait dengan kegiatan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak. Kriteria gejala yang diamati dari variabel ini terhadap *stakeholders*, sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan berbagai *stakeholders* yang terlibat
- Memberikan petunjuk atau arahan dalam pelaksanaan pengelolaan

3) Implementor

Stakeholder ini memiliki peran untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak secara langsung untuk melestarikan mangrove secara berkelanjutan. Kriteria gejala yang diamati dari variabel ini terhadap *stakeholders*, sebagai berikut :

- Melaksanakan pengelolaan hutan mangrove
- Mengawasi jalannya pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove
- Memiliki pengetahuan terkait pengelolaan hutan mangrove

4) Fasilitator

Stakeholder ini memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak. Kriteria gejala yang diamati dari variabel ini terhadap *stakeholders*, sebagai berikut :

- Memfasilitasi kegiatan pengelolaan hutan mangrove
- Mencukupi fasilitas yang dibutuhkan

5) Akselerator

Stakeholder ini memiliki peran untuk mempercepat kegiatan pengelolaan Hutan Mangrove secara berkelanjutan yang melibatkan seluruh *stakeholders* terkait. Kriteria gejala yang diamati dari variabel ini terhadap *stakeholders*, sebagai berikut :

- Mempercepat program pengelolaan hutan mangrove
- Menyumbangkan gagasan atau inovasi dalam pelaksanaan kegiatan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang pengelolaan Hutan Mangrove Tapak. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan perilaku yang dapat diamati sebagai cerminan dari *peran stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian kualitatif perlu memiliki batasan dan fokus yang terarah terhadap masalah penelitian. Fokus tersebut dapat ditentukan melalui interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, sehingga dapat menentukan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada peran pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sebagai *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak di Kota Semarang. Lokasi penelitian terletak di Hutan Mangrove Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Pemilihan lokasi penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran dan tugas yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* dalam pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan di Desa Tapak.

1.8.3 Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif yang belum memiliki kejelasan dan kepastian terkait objek penelitian, sumber data, dan hasil yang diharapkan tentu saja memerlukan proses pengumpulan data, analisis, dan menyusun kesimpulan dengan cara

terjun lapangan ke wilayah penelitian (Sugiyono, 2007: 222-224). Peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian yang didukung oleh berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data tersebut dibantu dengan berbagai alat penelitian, yakni :

a. Buku catatan

Buku catatan atau jurnal untuk mencatat hasil wawancara dari narasumber sebagai dokumentasi penting.

b. Alat rekam suara atau *video recorder*

Rekam suara atau alat perekam video digunakan untuk merekam seluruh percakapan dengan informan. Selain itu, ponsel juga dapat digunakan untuk merekam suara atau video guna memastikan data terkumpul lebih lengkap dan jelas.

c. Kamera

Kamera berfungsi sebagai alat menangkap foto saat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. Pengambilan foto dapat digunakan sebagai bukti dan meningkatkan validitas penelitian.

1.8.4 Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang berperan sebagai informan atau memberikan informasi kepada peneliti tentang fenomena yang akan diteliti. Informan diharapkan memiliki pemahaman tentang situasi dan kondisi yang terkait dengan latar belakang penelitian. Penelitian ini dalam pemilihan informan dilakukan melalui teknik *snowball*

sampling yaitu dengan proses bergulir dari informan satu ke informan lainnya yang ditemukan bahwa mereka memiliki pengetahuan terbaik mengenai informasi yang diinginkan.

Peneliti berusaha untuk mencari informan, baik individu maupun kelompok, yang benar-benar memahami aktivitas pengelolaan hutan mangrove dan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan peran mereka. Subjek penelitian dalam analisis peran *stakeholder* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak di Kota Semarang, antara lain :

- a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- b) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
- c) Dinas Perikanan Kota Semarang
- d) Kelurahan Tugurejo
- e) CV Akar Energi Mandiri
- f) Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip
- g) Komunitas Prenjak
- h) Pokdarwis Bina Tapak Lestari
- i) Masyarakat Tapak

1.8.5 Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) yang dikutip oleh Moleong (2007: 157-163), dalam penelitian kualitatif, sumber data utama terdiri dari kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan mencakup dokumen, foto dan lain-lain.

a) Lisan dan Tindakan

Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara, observasi, atau kombinasi keduanya, tergantung pada situasi dan kondisi. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti telah direncanakan sedemikian rupa sehingga semua pertanyaan dapat dijawab oleh informan, namun tidak membatasi informan untuk memberikan penjelasan di luar pertanyaan yang diajukan.

b) Sumber Tertulis

Sumber tertulis menjadi tambahan dalam penelitian yang dapat berupa buku dan jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sehingga, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan tentang subjek yang sedang diteliti.

c) Foto

Foto memberikan data deskriptif yang berharga dan mendukung validitas data. Sumber foto dapat menggambarkan kondisi nyata tentang subjek yang diteliti dengan memberikan keterangan pada setiap foto. Dalam penelitian ini, peneliti melampirkan beberapa foto yang menunjukkan kondisi fisik sarana prasarana dan situasi di Hutan Mangrove Tapak.

1.8.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan dapat dibagi menjadi dua kategori, antara lain :

- a) Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan dan diolah secara langsung dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh melalui observasi

dan wawancara dengan informan yang kemudian dicatat dan direkam oleh peneliti.

- b) Data sekunder merujuk pada data yang sudah ada dalam bentuk yang telah jadi, sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkan atau menyusun ulang data tersebut. Biasanya, data sekunder diperoleh melalui tulisan yang berasal dari buku, dokumen, atau sumber data dari internet yang sudah melalui proses pengolahan oleh penulisnya. Data sekunder ini siap pakai dan mudah digunakan oleh peneliti.

Dalam penelitian mengenai analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak di Kota Semarang, peneliti menggunakan kedua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk melengkapi penelitiannya.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh melalui tiga metode berikut :

- a) Observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai temuan yang dihasilkan. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan mengamati langsung fenomena di Hutan Mangrove Tapak.
- b) Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai hal yang relevan dengan masalah penelitian. Pertanyaan wawancara terkait dengan kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak di Kota Semarang. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti.

- c) Dokumentasi menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan menggunakan beberapa dokumen yang sudah ada terkait dengan kebijakan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak di Kota Semarang. Dokumentasi tersebut meliputi informasi tentang peta lokasi mangrove, dokumentasi penanaman dan kondisi hutan mangrove, serta regulasi yang terkait.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahap, sebagai berikut :

- a) Reduksi data yakni langkah untuk proses seleksi, pengelompokkan, penyederhanaan, pengarahannya, dan transformasi data yang relevan dari catatan mentah dari lapangan yang masih kasar menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami guna dapat diambil kesimpulan. Langkah ini bertujuan agar data yang didapatkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan aspek tertentu.
- b) Penyajian data yakni langkah penting dalam melakukan analisis kualitatif dimana informasi disusun sedemikian rupa, kemudian disajikan dalam bentuk tabel, gambar, diagram, dan naratif untuk memudahkan dalam memahami data tersebut. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan menggunakan uraian atau bagan yang membentuk pola dan hubungan antara data untuk melihat apa yang terjadi.
- c) Verifikasi data yakni langkah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan sementara, peneliti diharuskan

membuat kesimpulan yang fleksibel dan terbuka agar kemudian dalam perkembangannya akan menjadi lebih rinci dan kokoh yang diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan dalam rumusan masalah dan fenomena penelitian. Data harus diuji secara akurat dan sesuai dengan validitasnya, sehingga bukan berupa gagasan menarik tentang apa yang terjadi tanpa kejelasan terkait kebenaran dan manfaat.

Selanjutnya, interpretasi data dalam penelitian melibatkan upaya dalam menggali makna, memahami konteks penelitian dan menerapkan teori yang relevan guna memahami informasi yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumen. Proses ini dilakukan oleh peneliti untuk mencari pola umum, perbedaan atau kesamaan dalam data, dan menyusun argumen yang didukung oleh data yang ada, sehingga membantu peneliti dalam penyusunan kesimpulan.

1.8.9 Kualitas Data

Triangulasi dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperkuat keabsahan data hasil penelitian dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bentuk triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yang dilakukan dengan membandingkan informasi atau data melalui pengumpulan data menggunakan subjek atau metode yang berbeda untuk membandingkan kesamaan atau perbedaannya. Dengan demikian, dapat diketahui kredibilitas data yang diperoleh melalui perbandingan tersebut. Dalam hal ini, peneliti mencari sumber yang berbeda untuk melihat fenomena dari perspektif yang berbeda untuk memverifikasi keabsahannya.